

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE :
STUDI KASUS KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR**

Rira Nuradhawati¹

Indra Kristian²

Magister Hubungan Internasional,
Universitas Katolik Parahyangan¹
Hubungan Internasional, FISIP, Al-Ghifari²

Email:

rira.nuradhawati@lecture.unjani.ac.id

Abstrak

Pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan wilayah perbatasan Indonesia secara umum. Kabupaten Belu merupakan kabupaten yang berbatasan darat langsung dengan Timor Leste adalah pintu masuk utama daerah perbatasan antara Indonesia-Timor Leste. Kabupaten Belu banyak menyimpan kekayaan alam seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata akan tetapi dalam pemanfaatan potensi yang dimilikinya belumlah optimal. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman, pengetahuan maupun motivasi yang dimiliki oleh masyarakat dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya. Selain itu juga factor keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perbatasan turut menghambat dalam pelaksanaan pembangunan. Maka diperlukan upaya guna mengatasi permasalahan tersebut seperti adanya pendidikan dan pelatihan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat sehingga masyarakat lebih berdaya. Adanya keterlibatan TNI/Polri yang bekerja sama dengan pihak keamanan Timor Leste untuk mengatasi persoalan keamanan di perbatasan.

Kata Kunci: Pembangunan, ekonomi, perbatasan, keamanan, potensi daerah.

Abstract

Economic development in order to improve the welfare of the people in the Indonesia-Timor Leste border region has a very important role in the development of the Indonesian border region in general. Belu Regency is a district directly adjacent to

Timor Leste and is the main entrance to the border area between Indonesia and Timor Leste. Belu Regency saves a lot of natural wealth such as agriculture, plantations, animal husbandry, and tourism, but the utilization of its potential is not optimal. This is due to the low level of education, skills, experience, knowledge and motivation possessed by the community in exploring and developing the potential of their area. In addition, security factors and violations of law in border areas also hinder the implementation of development. So efforts are needed to overcome these problems such as education and training by the central government together with local governments by involving the community so that the community is more empowered. The involvement of the TNI/Polri in cooperation with the Timor Leste security forces to address security issues at the border.

Keywords: *Development, economy, borders, security, regional potential.*

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) dalam bentuk program prioritas pengembangan daerah perbatasan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat serta memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain

Pembangunan Nasional Negara Indonesia secara umum ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat secara adil dan merata diseluruh pelosok wilayah NKRI, baik yang tinggal di daerah perdesaan (*rural area*) maupun daerah perkotaan (*urban area*). Dalam pelaksanaan pembangunan Nasional tersebut sampai saat ini masih banyak ditemukan masalah yang belum dapat dipecahkan, beberapa yang terpenting diantaranya masalah kemiskinan, kesenjangan kemajuan antara wilayah di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), kesenjangan kemajuan antara kotadesa, masalah ketenaga-kerjaan, masalah lingkungan hidup, dan sebagainya. Salah satu wilayah yang perkembangannya cukup tertinggal dibandingkan wilayah lain adalah wilayah perbatasan. Selama ini wilayah perbatasan

identik dengan daerah perdesaan, daerah pinggiran, daerah tertinggal, atau daerah miskin yang cenderung termarginalkan.¹

Di Indonesia, kata “pembangunan” sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali, kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi.²

Isu pembangunan wilayah perbatasan saat ini memang telah menjadi salah satu isu yang cukup penting pada level nasional, sehingga masuk menjadi salah satu agenda prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan dan keamanan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan negara adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Wilayah perbatasan terdiri dari wilayah perbatasan darat dan laut, yang tersebar secara luas dengan tipologi yang sangat beragam mulai dari pedalaman hingga pulau-pulau kecil terdepan (terluar).³

Pengelolaan wilayah perbatasan, termasuk di perbatasan termasuk Indonesia-Timor Leste, memiliki peran yang sangat strategis. Hal ini mendasarkan pada pertimbangan karakteristik kegiatan yang berlangsung di wilayah perbatasan tersebut, yaitu antara lain sebagai pintu gerbang negara yang dapat memengaruhi kedaulatan dan yuridiksi negara baik darat maupun laut, serta mempunyai dampak terhadap kondisi keamanan dan pertahanan Indonesia. Atas dasar pemahaman ini sudah seharusnya wilayah perbatasan mendapatkan perhatian dan perlu selalu dicermati perkembangannya.⁴

¹ <http://repository.ut.ac.id/6397/1/42550.pdf>, diakses pada tanggal 26 Desember 2021 jam 13.02 WIB.

² Budiman, Arief. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal:1

³ <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/download/316/279>, diakses pada tanggal 26 Desember 2021 jam 17.33 WIB

⁴ Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Pertahanan di Wilayah yang Perbatasan Antaraneagra dalam konteks Otonomi Daerah (Studi Kasus di Wilayah Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste) hlm 5

Kawasan perbatasan merupakan suatu wilayah yang berada pada garis terluar dari suatu Negara yang berbatasan dan pemisah Negara lain. Salah satunya yaitu Kabupaten Belu yang merupakan pintu masuk daerah perbatasan antara Negara Indonesia dan Timor Leste. Hal ini Merupakan potensi dan peluang baik positif maupun Negatif yang dapat berkembang di daerah ini, Seperti dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dari berbagai aspek seperti Sosial, Ekonomi, dan Sumber daya alam yang dapat dikelola demi kesejahteraan masyarakat. Namun, hal- hal yang sering terjadi di daerah perbatasan tidak seperti yang diharapkan di mana masih ada kesenjangan sosial taraf hidup masyarakat yang rendah di mana angka kemiskinan dan pengangguran lebih meningkat, hal ini membuat masyarakat perbatasan menginginkan uang lebih mudah dengan caranya masing-masing dan mereka terkadang sering melakukan hal-hal tidak diinginkan salah satunya seperti Penyelundupan BBM, bahan sembako dimana adanya perbedaan nilai mata uang dan harga antara kedua Negara merupakan salah satu alasan untuk melakukan hal tersebut.

Kabupaten Belu terbagi atas 12 Kecamatan, 69 Desa dan 12 Kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tasifeto Barat dengan luas wilayah 224,19 km² atau 17,45% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Atambua Barat dengan luas wilayah 15,55 km² atau 1,21% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT yang berbatasan darat langsung dengan Negara Republik Demokratic Timor Leste (RDTL) sepanjang 126 KM dan terdapat 2 (dua) pintu resmi sebagai pintu gerbang di perbatasan RI-RDTL ini yaitu Motaain dan Turiskain.

Isu utama pengembangan ekonomi kawasan perbatasan Atambua-Timor Leste, adalah bagaimana meningkatkan kinerja Ekonomi mulai dari sektor pertanian, peternakan, perdagangan dan jasa serta aktifitas lintas batas. Dalam Perpres No.

179/2014 ini merupakan amanat Pasal 123 ayat (4) PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, penetapan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN), termasuk 9 kawasan strategis nasional Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara ditetapkan dengan Perpres. Kesembilan KSN tersebut meliputi RTR Kawasan Perbatasan Negara salah satunya yaitu Nusa Tenggara Timur Kawasan Perbatasan yang berhadapan dengan Laut Lepas. Deliniasi (wilayah)

pengaturan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi NTT mencakup kawasan perbatasan di darat dan di laut.

Kabupaten Belu masuk dalam kategori daerah tertinggal bila diukur dari tingkat kesejahteraan penduduknya. Indeks Pembangunan Manusia baru mencapai 62,8, sedangkan daerah lain sudah mencapai 65,4. Pendapatan asli daerah Kabupaten Belu juga baru mencapai 8,6 persen dari total APBD. Kontribusi terbesar perekonomian Kabupaten Belu diperoleh melalui sektor pertanian, jasa, perdagangan, hotel, dan restoran.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Belu tentu saja harus didukung dari sisi keamanan, hal ini disebabkan pelanggaran hukum sering muncul di daerah perbatasan seperti aktivitas penyeludupan dan aksi ilegal lainnya. Di samping itu, urusan tapal batas negara antara Indonesia dan Timor Leste juga belum selesai. Untuk itu kontribusi pihak kepolisian dan TNI dalam melaksanakan pengamanan di titik perbatasan Indonesia dan Timor Leste merupakan sesuatu hal yang penting. Selain itu, pihak berwenang dapat bekerja sama dengan Satgas Pamtas dan UPF PNTL (*Unidade Patroilhamento Forientra Polisi Nasional Timor Leste*) dalam berbagai hal teknis seperti patroli bersama-sama antara TNI dan UPF PNTL di setiap garis perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Selain demi menjaga faktor keamanan, kerja sama TNI dan UPF PNTL dimaksudkan untuk menjaga hubungan baik kedua negara. Faktor keamanan sangat penting dalam pembangunan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Sebagaimana diketahui, pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi dapat berjalan dengan baik jika faktor keamanan dapat juga terjaga dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste: studi kasus Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste : studi kasus Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan maksud untuk mengungkapkan secara komprehensif dan alami bagaimana pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia – Timor Leste: Studi kasus Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif, karena dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memfokuskan pada pengamatan dari pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan di wilayah perbatasan Indonesia – Timor Leste : studi kasus Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian deskriptif itu sendiri menurut Sugiyono adalah untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum”.⁵

PEMBAHASAN

Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.

Menurut Todaro, proses pembangunan harus memiliki 3 tujuan inti:

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan, kesehatan, perlindungan dan keamanan).
2. Peningkatan standar kehidupan yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan. Namun juga meliputi penambahan penyediaan, lapangan pekerjaan, perbaikan, kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan. Dimana semuanya itu tidak

⁵ Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta. Hal:29

hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil melainkan juga untuk menumbuhkan jati diri pribadi bangsa yang bersangkutan.

3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi tiap individu dan bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari sikap ketergantungan.⁶

Dari apa yang dikemukakan oleh Todaro, dapat diketahui bahwa dalam proses pembangunan itu harus memiliki 3 tujuan inti yaitu 1) peningkatan ketersediaan kebutuhan pokok, 2) peningkatan standar kehidupan meliputi penyediaan lapangan kerja, kualitas pendidikan dan perhatian atas nilai-nilai budaya dan juga kemanusiaan, 3) adanya perluasan pilihan ekonomi sehingga masyarakat terbebas dari sikap ketergantungan.

Dalam upaya pembangunan kawasan perbatasan terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya antara lain:

1. Pasal 25A UUD 1945
2. UU No 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
3. Perpres Nomor 12 Tahun 2010
4. Perpres Nomor 44 Tahun 2017 tentang BNPP
5. Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024

Adanya peraturan perundang-undangan tersebut menjadi pedoman dalam upaya pembangunan wilayah perbatasan Kabupaten Belu Indonesia dengan Timor Leste sehingga bisa tercipta pembangunan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsep dasar yang digunakan dalam pengembangan kawasan perbatasan yang ditunjukkan sekaligus sebagai kawasan pengembangan aktivitas ekonomi dan perdagangan mengacu pada tiga pendekatan yang digunakan yaitu: pendekatan kesejahteraan, pendekatan keamanan, dan pendekatan lingkungan.⁷

Dengan adanya pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia – Timor Leste, khususnya di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat

⁶ **Todaro**, Michael P. dan Stephen C. Smith. **2006**. Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I). Jakarta : Erlangga

⁷ Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2015, Jakarta: BNPP RI, 2011, Seri BNPP 01S- 0111. Hlm.34.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Friedlander⁸ mengatakan bahwa kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi yang dilakukan melalui pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial dengan tujuan untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan serta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Ada beberapa parameter umum yang sesuai dengan kondisi Indonesia yang dapat dipertimbangkan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, antara lain adalah parameter ekonomi, perumahan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, spritualitas, rekreasional, dan jaminan sosial.⁹

Inti kesejahteraan adalah kapabilitas.¹⁰ Setiap masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan program bagi setiap warganya, khususnya anak-anak dan *gender* sehingga mereka dapat mencapai pemenuhan kebutuhan maksimal dan berkembang menjadi manusia yang *capable*. Semakin besar kapabilitas maka semakin besar pula kebebasan dalam merespon peluang-peluang yang ada. Pengembangan kemampuan (kapabilitas) manusia berkaitan dengan peningkatan harapan hidup, bebas dari buta huruf, kesehatan, dan pendidikan dalam masyarakat. Kapabilitas memungkinkan manusia untuk dapat menjalani hidup yang lebih bermakna (sejahtera).

Wilayah Atambua sebagai ibukota dari Kabupaten Belu Atambua memiliki potensi yang dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya bila dikelola dengan baik. Kabupaten Belu yang dijadikan objek penelitian memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan sebagai penunjang perekonomian.

Dalam bidang pertanian Atambua menghasilkan banyak jenis tanaman seperti jagung, padi, kacang-kacangan, mente, kelapa, dan kemiri. Kondisi masyarakat masih melakukan kegiatan pertanian dengan metode yang masih sangat tradisional dimana

⁸ **Friedlander, W.A. & Apte, R.Z. 1980**, Introduction to social Welfare (5th ed),. Englewood Cliff, Nj :Prentice Hall.

⁹ **Adi, Isbandi Rukminto. (2013). Kesejahteraan Sosial** (pekerjaan sosial, pembangunan sosial dan kajian pembangunan), Jakarta: PT RajaGrafindo. Persada.

¹⁰ Sen, Amartya. 2009. The Idea of justice. Cambridge : Harvard University Press

masyarakat menanam tanaman pangan, menggarap lahan, menjual hasil panen dan mengolah hasil panen tersebut. Kondisi tersebut apabila dibiarkan memiliki dampak negatif karena perkembangan masyarakat dalam bidang pertanian dan perkebunan dapat dikatakan stagnan bahkan cenderung menurun. Permasalahan semakin kompleks ketika usia dari anggota masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut memasuki masa atau usia tidak produktif. Banyak dari anggota masyarakat yang berusia produktif lebih memilih untuk pergi merantau ke daerah lain ataupun luar negeri. Apabila keadaan ini tidak mendapatkan perhatian maka kemungkinan besar Atambua akan berganti menjadi wilayah industri dan perekonomian dikuasai oleh para pendatang.

Masyarakat juga mengembangkan bidang peternakan yang menjadi salah satu potensi daerah dalam rangka pembangunan bidang ekonomi. Kegiatan membudidayakan ternak tersebut memberikan keuntungan ekonomi yang sangat besar kepada masyarakat setempat. Namun demikian, sama halnya dalam pengelolaan bidang pertanian, bidang peternakan juga masih mempergunakan cara-cara tradisional. Sehingga dari tahun ke tahun tidak ada perubahan baik dari segi pendapatan maupun peningkatan jumlah ternak yang dapat diperoleh masyarakat. Kurangnya informasi dan pelatihan dalam bidang peternakan, juga disebabkan masyarakat sudah merasa puas dengan apa yang diperolehnya. Oleh karena itu harus ada upaya untuk merubah pandangan tersebut sehingga masyarakat mampu mengelola pertanian maupun peternakan menjadi salah satu sumber perekonomian yang menjanjikan bagi mereka.

Bidang perikanan dan pertambangan juga tidak kalah penting sebagai salah satu upaya pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bidang pertambangan seperti marmer, batu, dan kapur merupakan kekayaan tambang Atambua yang belum dieksplorasi secara maksimal. Bidang pertambangan menjadi pekerjaan terakhir yang dipilih oleh masyarakat disebabkan mereka tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lain. Oleh karena itu, tenaga terampil dalam bidang pertambangan sangat diperlukan. Kondisi yang sama juga ditemukan dalam bidang perikanan. Dimana masyarakat melakukan kegiatan menangkap ikan, membudidayakan ikan, dan membudidayakan rumput laut secara tradisional sehingga belum dapat memberikan keuntungan yang signifikan.

Wilayah Atambua juga memiliki potensi alam, yakni potensi wisata pantai yang dapat dijadikan salah satu pertimbangan guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Berjarak sekitar 70 km arah selatan dari Kota Atambua, potensi wisata pantai ini dapat ditempuh dalam waktu 2 jam menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat. Daerah ini terkenal dengan hamparan pasir putih, tingginya gulungan ombak, dan sunrise. Pantai ini memiliki potensi alam yang cukup menarik seperti air payau, tambaktambak ikan, serta pasir putih. Pada bulan Januari–Maret kondisi ombak di pantai ini cukup besar sehingga dapat dipergunakan untuk berselancar.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan ekonomi, masyarakat masih belum bisa memanfaatkan potensi yang mereka miliki secara optimal yang disebabkan adanya keterbatasan dalam keterampilan, pengalaman, pengetahuan, pendidikan juga motivasi. Kondisi ini sudah lama terjadi dan belum adanya usaha yang maksimal baik dari diri pribadi, masyarakat ataupun pemerintah guna merubah paradigma dari masyarakat dalam rangka memanfaatkan potensi daerah secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya dari pemerintah melalui program-program pembangunan sehingga masyarakat dan juga pemerintah dapat bekerja sama dalam pembangunan untuk memanfaatkan potensi daerah yang ada. Dalam rangka memberikan stimulus kepada masyarakat untuk berubah, maka diperlukan adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan di lingkungan masyarakat agar lebih berdaya dalam rangka memanfaatkan potensi daerah baik secara pribadi maupun kelompok yang ada di masyarakat. Agar masyarakat memiliki stimulus untuk berubah, perlu adanya contoh dan pelatihan di lingkungan masyarakat dalam memanfaatkan potensi daerah, baik secara pribadi maupun kelompok.

Selain program dari pemerintah dengan adanya upaya pendidikan dan pelatihan untuk merubah paradigma masyarakat sehingga mampu memanfaatkan potensi daerah secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus juga didukung adanya factor keamanan mengingat wilayah yang merupakan wilayah perbatasan sehingga memiliki banyak ancaman dan resiko dalam hal keamanan yang dikhawatirkan akan menghambat jalannya pembangunan ekonomi.

Wilayah perbatasan Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste memiliki tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Belu dengan ibu kota Atambua, Kabupaten

Timor Tengah Utara dengan ibu kota Kefamenanu, dan Kabupaten Kupang dengan ibu kota Oelamasi. Ketiga kabupaten tersebut memiliki banyak jalan tradisional yang melintasi perbukitan, sungai, dan hutan. Kondisi tersebut dapat dijadikan jalur pejalan kaki untuk menyeberang antarnegara secara ilegal, sehingga dapat menimbulkan masalah seperti pelanggaran hukum, tindakan kriminal dan konflik yang pada akhirnya akan melibatkan dua negara yaitu Indonesia dan Timor Leste.

Kemudian adanya wilayah sengketa di perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste masih menyisakan berbagai macam masalah sehingga harus segera diselesaikan untuk mencegah timbulnya konflik yang pada akhirnya akan menghambat proses pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut. Di lapangan juga nampak adanya ketidakjelasan dari demarkasi yang merupakan salah satu faktor potensial memicu konflik antarwarga kedua negara yang tinggal di wilayah perbatasan.

Adanya kondisi yang mengancam keamanan di wilayah perbatasan menyebabkan timbulnya beberapa tindakan kriminal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya penyelundupan yang disebabkan kondisi ekonomi dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan mendorong masyarakat melakukan kegiatan ekonomi yang bersifat ilegal. Adanya perbedaan harga yang mencolok baik itu dalam BBM, pupuk bersubsidi, sembako maupun kebutuhan lainnya, mendorong masyarakat dari kedua negara melakukan kegiatan penyelundupan dengan tujuan mencari keuntungan. Buruknya mental para birokrat dan juga lemahnya pengawasan menyebabkan kegiatan ilegal seperti penyelundupan ini tumbuh subur melalui pos-pos lintas batas negara.
2. Adanya tindakan pencurian ternak yang disebabkan kegiatan beternak masyarakat masih bersifat tradisional, dimana ternak dilepas begitu saja dan tidak diawasi sehingga ternak menyeberang ke wilayah negara tetangga dan sebaliknya.
3. Adanya kondisi lintas batas ilegal yang disebabkan masih dekatnya hubungan kekerabatan antara masyarakat Indonesia dengan Timor Leste meskipun secara politik mereka terpisah tapi secara sosial budaya mereka tidak terpisahkan satu sama lain.

Pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan mengalami banyak kendala yang disebabkan minimnya berbagai fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia di wilayah perbatasan sehingga menambah angka kemiskinan di wilayah tersebut. Infrastruktur jalan yang kurang bagus juga turut menghambat pembangunan. Wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur sangat tertinggal dilihat dari minimnya sarana dan prasarana jalan meskipun wilayah tersebut memiliki potensi daerah yang tinggi dari bidang pertanian, perikanan, pertambangan maupun wisata. Namun rendahnya aksesibilitas menyebabkan perekonomian di wilayah perbatasan sulit berkembang sehingga pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat di wilayah perbatasan sehingga kesejahteraan masyarakat akan sulit diwujudkan.

Oleh karena itu, guna mendukung jalannya pelaksanaan pembangunan ekonomi yang kondusif dan mampu memanfaatkan semua potensi yang dimiliki oleh daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia dengan adanya pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan semua potensi yang dimiliki daerahnya. Selain itu pula adanya dukungan dari bidang keamanan, karena pembangunan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik apabila kondisi keamanan tidak mendukungnya. Kabupaten Belu dengan Atambua sebagai ibukotanya memiliki banyak persoalan yang berkaitan dengan keamanan di wilayah perbatasan seperti terjadinya tindakan penyelundupan, pencurian ataupun pelanggaran lintas batas negara sehingga perlu adanya perhatian serius dari pemerintah dengan keterlibatan aparat keamanan yakni TNI dan Polri guna menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan dalam rangka mendukung jalannya pelaksanaan pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-

Timor Leste : Studi kasus Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Adanya potensi dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan dan wisata perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin mengingat masyarakat masih mengelolanya secara tradisional sehingga kurang optimal dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat setempat untuk merubah paradigma yang berkembang selama ini di masyarakat.
2. Membuka peluang masuknya para investor untuk menjadi motor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi karena selama ini pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut belum dilakukan secara optimal. Untuk itu diperlukan adanya upaya pemberdayaan bagi masyarakat, pemerintah daerah dan juga swasta. Harapannya dengan masuknya investasi ini mampu memberdayakan masyarakat dan pemerintah setempat.
3. Dalam rangka menarik dan meningkatkan keterlibatan para investor dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan, maka diperlukan adanya upaya untuk memperkenalkan daerah dengan adanya profil daerah yang menyuguhkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh para investor. Profil daerah ini sendiri bermaksud agar para investor dapat menangkap dan menentukan peluang investasi sehingga lebih cepat mengambil keputusan untuk melakukan investasi di wilayah perbatasan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan dalam bidang ekonomi.
4. Situasi dan kondisi keamanan di wilayah perbatasan kerap kali menimbulkan pelanggaran hukum seperti terjadinya tindakan kriminal penyelundupan BBM, pupuk bersubsidi, sembako ataupun barang kebutuhan lainnya dan juga pelanggaran lintas batas negara sehingga memerlukan kerja sama dan pengawasan dalam bidang keamanan oleh TNI/Polri dengan pihak keamanan Timor Leste.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Adi, Isbandi Rukminto. (2013). *Kesejahteraan Sosial (pekerjaan sosial, pembangunan sosial dan kajian pembangunan)*, Jakarta: PT RajaGrafindo. Persada.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan, *Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2015*, Jakarta: BNPP RI, 2011, Seri BNPP 01S- 0111.
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Friedlander, W.A. & Apte, R.Z. 1980, *Introduction to social Welfare (5th ed)*, Englewood Cliff, Nj : Prentice Hall.
- Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Pertahanan di Wilayah yang Perbatasan Antaraneegara dalam konteks Otonomi Daerah (Studi Kasus di Wilayah Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste)
- Sen, Amartya. 2009. *The Idea of justice*. Cambridge : Harvard University Press
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I)*. Jakarta : Erlangga

B. Internet

- <http://repository.ut.ac.id/6397/1/42550.pdf>, diakses pada tanggal 26 Desember 2021 jam 13.02 WIB.
- <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/download/316/279>, diakses pada tanggal 26 Desember 2021 jam 17.33 WIB
- <https://media.neliti.com/media/publications/41513-ID-membangun-perilaku-masyarakat-atambua-melalui-pemanfaatan-potensi-daerah-dan-kea.pdf>, diakses pada tanggal 27 Desember 2021 jam 6.04 WIB
- <http://eprints.itn.ac.id/405/2/eprints.pdf>, diakses pada tanggal 27 Desember 2021 jam 6.05 WIB.